

ABSTRACT

This abstract provides an overview of the urgency to implement an integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) framework within State-Owned Enterprises (SOEs). As SOEs must continually strive to improve their profitability for their survival, it is crucial for them to enhance their ability to borderline between business risk and state loss. The lack of a distinct line separating state losses from business risks in SOEs has resulted in a number of issues, including the criminalization of reasonable business decisions. This undergraduate thesis specifically investigates the case of the former president director of PT Bukit Asam, where the acquisition of PT Satria Bahana Sarana (SBS) by PT Bukit Asam was alleged to have caused state losses. This study uses a normative legal research methodology employing conceptual and case-study approaches. Data was analyzed from primary, secondary, and tertiary legal sources. The analysis performed is interpretation data analysis data based on grammatical interpretation, systematic interpretation, and comparative interpretation. Key findings indicate that integrated GRC helps organizations to provide greater transparency and minimize the possibility of non-compliance, which serves as a borderline between business risk and state-loss. Furthermore, the analysis of the PT Bukit Asam case reveals that the financial setback encountered was a business risk rather than a state loss, as the management adhered to fiduciary duty and Good Corporate Governance (GCG) principles.

Keywords: *GRC, State-Owned Enterprise, and State-loss*

ABSTRAK

Abstrak ini memberikan gambaran umum mengenai urgensi untuk menerapkan kerangka kerja Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRC) yang terintegrasi di dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengingat BUMN harus terus berupaya untuk meningkatkan profitabilitasnya demi kelangsungan hidupnya, sangat penting bagi BUMN untuk meningkatkan kemampuannya dalam membedakan antara risiko bisnis dan kerugian negara. Tidak adanya garis pemisah yang jelas yang memisahkan kerugian negara dari risiko bisnis di BUMN telah mengakibatkan sejumlah permasalahan, termasuk kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang wajar. Skripsi ini secara khusus meneliti kasus mantan direktur utama PT Bukit Asam, di mana akuisisi PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT Bukit Asam diduga telah merugikan negara. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan studi kasus. Data dianalisis dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang dilakukan adalah analisis data interpretasi berdasarkan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi komparatif. Temuan utama menunjukkan bahwa GRC yang terintegrasi membantu organisasi untuk memberikan transparansi yang lebih besar dan meminimalkan kemungkinan ketidakpatuhan, yang berfungsi sebagai garis pemisah antara risiko bisnis dan kerugian negara. Lebih lanjut, analisis terhadap kasus PT Bukit Asam mengungkapkan bahwa kemunduran finansial yang terjadi merupakan risiko bisnis, bukan kerugian negara, karena manajemen telah mematuhi kewajiban fidusia (fiduciary duty) dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Kata Kunci: GRC, Badan Usaha Milik Negara, dan Kerugian Negara